

# Dinamika Perubahan Politik di Era Modernisasi dan Industrialisasi

## *Dynamics of Political Change in The Era of Modernization and Industrialization*

Ajeng Hasti Widya<sup>1</sup>, Nita Aribah Hanif<sup>2</sup>

Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01  
Hal : 17-24  
Diterbitkan : 01 Juli 2025

### Abstrak

Konflik kepentingan di Indonesia terkait kelas buruh, tuntutan terhadap keadilan sosial, dan distribusi kekayaan merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi, kelas buruh di Indonesia menghadapi tantangan seperti upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan akses terbatas terhadap jaminan sosial. Tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan sosial seringkali berbenturan dengan kepentingan pemilik modal dan elite politik. Dalam penelitian ini, beberapa contoh kasus akan dianalisis, termasuk konflik upah minimum, penggunaan tenaga kerja kontrak, konflik pertambangan dan lingkungan, serta konflik agraria. Setiap contoh mencerminkan perbedaan kepentingan antara kelas buruh yang menuntut hak-hak dasar dan perlindungan sosial, serta pemilik modal yang memprioritaskan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menganalisis dinamika ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi kelas buruh di Indonesia dan pentingnya pembangunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi konflik kepentingan di masa depan.

**Kata Kunci : Perubahan Politik, Industrialisasi, Modernisasi**

### Abstract

*Conflicts of interest in Indonesia regarding the working class, demands for social justice, and the distribution of wealth are complex and multifaceted issues. Along with economic development and industrialization, the working class in Indonesia faces challenges such as low wages, poor working conditions, and limited access to social security. Their demands for social justice often clash with the interests of capital owners and political elites. In this research, several case examples will be analyzed, including minimum wage conflicts, the use of contract labor, mining and environmental conflicts, and agrarian conflicts. Each example reflects the differences in interests between the working class, which demands basic rights and social protection, and the owners of capital, who prioritize profits and economic growth. By analyzing these dynamics, this research aims to provide a deeper understanding of the challenges facing the working class in Indonesia and the importance of developing policies that are responsive to their needs. It is hoped that the results of this research can become a basis for formulating more*

Korespondensi  
No Handphone : 0895-6035-81376  
E-mail : hastiwydaa@gmail.com

*inclusive and sustainable strategies in dealing with conflicts of interest in the future. The results show that although both eras had economic development goals, differences in power structures and behavior of political elites resulted in significant outcomes in terms of sustainable economic growth, equitable development, and overall quality of development. This study makes an important contribution to understanding the complexity of the relationship between politics and economics in the context of Indonesian development, especially the crucial role of political elites in shaping the direction and outcomes of development.*

**Keywords: Political Change, Industrialization, Modernization**

---

## Latar Belakang

Perubahan merupakan konstanta dalam perjalanan sejarah peradaban manusia<sup>1</sup>. Era modernisasi dan industrialisasi, yang ditandai oleh kemajuan teknologi, urbanisasi, dan perubahan struktur ekonomi, telah memicu dinamika perubahan politik yang signifikan di berbagai belahan dunia. Transformasi ini tidak selalu berjalan linier dan harmonis; seringkali diiringi oleh konflik, ketidakpastian, dan tantangan dalam membangun tatanan politik yang stabil dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perubahan politik di era ini menjadi krusial untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Jurnal ini akan menganalisis berbagai aspek dinamika tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik pembangunan politik yang lebih responsif terhadap konteks modernisasi dan industrialisasi.

Modernisasi dan industrialisasi, sebagai proses transformasi sosial ekonomi yang mendalam, telah mengubah lanskap politik secara dramatis<sup>2</sup>. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah memperluas akses informasi dan memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat memicu polarisasi dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Urbanisasi yang pesat menciptakan konsentrasi penduduk di perkotaan, yang berdampak pada struktur kekuasaan dan dinamika politik lokal. Perubahan struktur ekonomi, dengan munculnya kelas menengah baru dan perubahan relasi produksi, juga telah membentuk ulang peta politik dan kepentingan berbagai aktor.

Proses industrialisasi seringkali diiringi oleh perubahan dalam struktur sosial, munculnya kelas buruh, dan tuntutan terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata<sup>3</sup>. Hal ini dapat memicu konflik politik antara berbagai kelompok kepentingan, dan menuntut adaptasi sistem politik untuk mengakomodasi tuntutan tersebut. Lebih lanjut, globalisasi dan integrasi ekonomi internasional semakin memperumit dinamika perubahan politik, dengan pengaruh kekuatan eksternal yang signifikan terhadap kebijakan domestik. Oleh karena itu, studi mengenai dinamika perubahan politik di era modernisasi dan industrialisasi memerlukan pendekatan multi- dimensi, yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis proses-proses tersebut, menganalisis dampaknya terhadap stabilitas dan legitimasi sistem politik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun tatanan politik yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis literatur sebagai metode utamanya<sup>4</sup>. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggalian pemahaman yang mendalam mengenai dinamika perubahan politik di era modernisasi dan industrialisasi melalui kajian teoritis dan empiris yang telah ada. Studi pustaka akan difokuskan pada literatur-literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen- dokumen kebijakan yang membahas topik modernisasi, industrialisasi, dan dampaknya terhadap sistem politik.

## Tahapan Penelitian:

1. **Identifikasi dan Seleksi Sumber Literatur:** Tahap awal penelitian ini melibatkan identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi isi, dan cakupan geografis dan temporal yang sesuai dengan fokus penelitian. Kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian literatur meliputi: modernisasi, industrialisasi, pembangunan politik, perubahan politik, demokrasi, stabilitas politik, partisipasi politik, kelas sosial, globalisasi, dan lain sebagainya. Pencarian literatur akan dilakukan melalui berbagai basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan repositori online.
2. **Analisis Literatur:** Setelah sumber literatur terpilih, tahap selanjutnya adalah analisis isi literatur secara sistematis. Analisis ini akan berfokus pada identifikasi tema, konsep, teori, dan temuan empiris yang relevan dengan dinamika perubahan politik di era modernisasi dan industrialisasi<sup>5</sup>. Analisis ini akan dilakukan secara kritis, dengan mempertimbangkan konteks historis, geografis, dan metodologis masing-masing sumber. Teknik analisis yang digunakan akan berupa analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul secara berulang dalam literatur yang diteliti.
3. **Sintesis dan Interpretasi:** Tahap akhir penelitian ini melibatkan sintesis dan interpretasi temuan dari analisis literatur. Proses sintesis akan bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif dan temuan yang telah diidentifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perubahan politik yang diteliti. Interpretasi akan berfokus pada pengungkapan makna dan implikasi temuan tersebut bagi pengembangan teori dan praktik pembangunan politik yang lebih responsif terhadap konteks modernisasi dan industrialisasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan pada studi pustaka dan literatur. Oleh karena itu, temuan penelitian ini bersifat interpretatif dan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian lanjutan yang menggunakan metode penelitian lain, seperti studi kasus atau survei, diperlukan untuk memperkuat dan memperluas temuan penelitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini, berdasarkan studi pustaka dan literatur, menunjukkan dinamika perubahan politik di Indonesia selama era modernisasi dan industrialisasi ditandai oleh beberapa tren utama yang saling terkait dan kompleks. Analisis ini akan merujuk pada beberapa teori relevan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh kongkrit dari Indonesia.

1. **Teori Modernisasi:** Teori modernisasi, yang dipelopori oleh para tokoh seperti Rostow

dan Lipset, berargumen bahwa modernisasi ekonomi akan berdampak pada perubahan sosial dan politik. Industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan akan memicu munculnya kelas menengah, yang pada gilirannya menuntut partisipasi politik yang lebih besar dan demokrasi yang lebih substansial<sup>6</sup>. Contoh di Indonesia adalah Perkembangan industri manufaktur dan jasa di Indonesia pasca Orde Baru telah mendorong pertumbuhan kelas menengah. Kelas menengah ini secara aktif terlibat dalam politik, baik melalui partisipasi dalam pemilu, gerakan sosial, maupun advokasi kebijakan publik. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tidak merata, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi isu yang signifikan.

2. **Teori Dependensi:** Berbeda dengan teori modernisasi, teori dependensi (misalnya, Prebisch dan Frank) menekankan peran negara-negara maju dalam menghambat pembangunan negara-negara berkembang. Industrialisasi di negara berkembang seringkali terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global yang tidak adil, sehingga menguntungkan negara-negara maju dan memperparah ketimpangan<sup>7</sup>. Salah satu contoh di Indonesia adalah Integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global melalui perdagangan dan investasi asing telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan. Eksploitasi sumber daya alam, dominasi perusahaan multinasional, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta berdampak pada stabilitas politik.
3. **Teori Negara:** Teori negara (Skocpol dan Tilly) menekankan peran negara dalam proses modernisasi dan industrialisasi. Kemampuan negara untuk membangun birokrasi yang efektif, menegakkan hukum, dan mengelola konflik sosial sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan politik<sup>8</sup>. Misalnya, reformasi pasca-Orde Baru di Indonesia ditandai dengan upaya untuk membangun negara hukum yang lebih kuat dan demokratis. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya praktik patronase dalam politik.
4. **Teori Mobilisasi Sumber Daya:** Teori ini menekankan peran sumber daya dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial dan politik. Akses terhadap sumber daya ekonomi, organisasi, dan informasi sangat penting bagi aktor politik dalam mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya, berbagai gerakan sosial di Indonesia, seperti gerakan buruh, gerakan mahasiswa, dan gerakan lingkungan hidup, telah memainkan peran penting dalam perubahan politik. Keberhasilan gerakan-gerakan ini seringkali bergantung pada kemampuan mereka untuk memobilisasi sumber daya dan membangun jaringan dukungan yang luas.

Modernisasi dan industrialisasi, meskipun membawa kemajuan, memiliki sisi gelap yang tak terelakkan. Proses ini, yang ditandai dengan perkembangan teknologi, urbanisasi, dan perubahan struktur ekonomi, seringkali memicu polarisasi dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Ketimpangan ekonomi yang muncul akibat modernisasi menjadi salah satu pemicu utama. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, dan modal menikmati keuntungan lebih besar dari modernisasi, sementara kelompok lain tertinggal. Kesenjangan ini memicu rasa ketidakadilan dan kemarahan, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara mereka yang merasa diuntungkan dan yang merasa terpinggirkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan media sosial,

seolah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mempermudah akses terhadap informasi dan membuka peluang baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, teknologi ini juga dapat memperkuat polarisasi dengan mempermudah orang-orang untuk mencari informasi yang sejalan dengan pandangan mereka dan menghindari informasi yang berbeda. Algoritma media sosial yang dirancang untuk menampilkan konten sesuai preferensi pengguna semakin memperkuat fenomena ini, menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias dan pandangan ekstrem. Fenomena ini semakin diperparah dengan kemudahan penyebaran informasi yang tidak akurat, seperti berita bohong (hoax) dan propaganda. Informasi ini menyebar dengan cepat dan luas melalui media sosial, sulit dihentikan karena sifatnya yang viral. Kurangnya literasi digital dan kemampuan untuk memverifikasi informasi semakin memperburuk masalah ini.

Perubahan nilai dan budaya yang dipicu oleh modernisasi juga menjadi faktor penting. Tradisi dan norma sosial lama mungkin tergantikan oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan materialisme. Perubahan ini memicu konflik antara kelompok yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kelompok yang menerima nilai-nilai modern. Kelompok yang merasa terancam oleh perubahan ini mungkin menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk mempertahankan nilai-nilai mereka atau menentang perubahan yang dianggap mengancam identitas mereka.

Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami proses modernisasi dan industrialisasi, juga merasakan dampak negatif ini. Polarisasi politik yang meningkat, terutama di media sosial, menjadi bukti nyata. Perbedaan pandangan politik, terutama terkait isu agama dan identitas, seringkali diungkapkan dengan cara yang agresif dan penuh kebencian. Informasi yang tidak akurat dan provokatif disebarluaskan untuk memperkuat polarisasi dan memecah belah masyarakat. Indonesia juga rentan terhadap penyebaran hoax dan propaganda, terutama menjelang pemilu. Informasi yang tidak akurat ini disebarluaskan untuk mempengaruhi opini publik dan menguntungkan kandidat tertentu. Hal ini menghambat proses demokrasi dan memperburuk polarisasi politik.

Modernisasi dan industrialisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat, tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga memicu polarisasi dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital, memupuk toleransi dan dialog yang konstruktif, serta membangun sistem media yang bertanggung jawab. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang tepat juga diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan melindungi kebebasan berekspresi.

Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menciptakan konsentrasi penduduk di perkotaan, yang berdampak signifikan pada struktur kekuasaan dan dinamika politik lokal. Perubahan struktur ekonomi, dengan munculnya kelas menengah baru dan perubahan relasi produksi, juga telah membentuk ulang peta politik dan kepentingan berbagai aktor.

Urbanisasi yang cepat di Indonesia telah menyebabkan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Hal ini menciptakan tekanan pada infrastruktur dan sumber daya, serta memicu persaingan untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik, pekerjaan, dan perumahan. Kondisi ini menciptakan dinamika politik lokal yang kompleks, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kontrol atas sumber daya yang terbatas.

Studi kasus yang terjadi di Jakarta misalnya. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia,

mengalami urbanisasi yang sangat pesat, konsentrasi penduduk yang tinggi di Jakarta telah menyebabkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hal ini telah memicu munculnya berbagai kelompok masyarakat yang mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingan mereka, seperti kelompok warga yang menuntut perbaikan infrastruktur, kelompok buruh yang menuntut upah yang layak, dan kelompok mahasiswa yang menuntut akses pendidikan yang lebih baik. Dinamika politik lokal di Jakarta menjadi sangat kompleks, dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah memicu perubahan yang signifikan dalam struktur kekuasaan dan dinamika politik lokal. Konsentrasi penduduk di perkotaan telah menciptakan persaingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang terbatas, sementara perubahan struktur ekonomi telah membentuk ulang peta politik dan kepentingan berbagai aktor. Penting untuk memahami dinamika ini agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, konflik kepentingan di Indonesia terkait kelas buruh, tuntutan keadilan sosial, dan distribusi kekayaan merupakan isu kompleks yang telah berlangsung lama. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi, kelas buruh di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan akses terbatas terhadap jaminan sosial. Tuntutan mereka terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil seringkali berbenturan dengan kepentingan pemilik modal dan elite politik.

Salah satu kasus yang terjadi hampir setiap tahun, terjadi perdebatan antara serikat pekerja dan pengusaha terkait penetapan upah minimum. Serikat pekerja menuntut kenaikan upah minimum yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara pengusaha berargumen bahwa kenaikan upah minimum akan membebani perusahaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, konflik kepentingan yang mencerminkan perbedaan kepentingan antara kelas buruh dan pemilik modal. Kelas buruh menuntut keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil, sementara pemilik modal memprioritaskan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, sebagai mediator, seringkali berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Penggunaan tenaga kerja kontrak yang semakin meluas di Indonesia telah memicu konflik kepentingan antara pekerja kontrak dan perusahaan. Pekerja kontrak seringkali menghadapi ketidakpastian kerja, upah yang lebih rendah, dan akses terbatas terhadap jaminan sosial. Mereka menuntut status kerja yang lebih baik dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Konflik ini menunjukkan perbedaan kepentingan antara pekerja kontrak dan perusahaan. Perusahaan cenderung menggunakan tenaga kerja kontrak untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan fleksibilitas. Namun, hal ini merugikan pekerja kontrak yang kehilangan hak-hak dasar dan jaminan sosial.

Konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal seringkali terjadi di Indonesia. Perusahaan pertambangan seringkali dianggap mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat lokal menuntut keadilan sosial dan kompensasi yang layak atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang mereka alami. Konflik ini menunjukkan perbedaan kepentingan antara perusahaan pertambangan yang memprioritaskan keuntungan dan

pemilik modal, dan masyarakat lokal yang menuntut keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Pemerintah, sebagai regulator, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Konflik agraria di Indonesia seringkali terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan yang mengklaim hak atas tanah. Masyarakat adat menuntut pengakuan hak atas tanah mereka dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Mereka berargumen bahwa perusahaan telah merampas tanah mereka secara tidak adil dan melanggar hak-hak mereka sebagai pemilik tanah tradisional. Konflik ini menunjukkan perbedaan kepentingan antara masyarakat adat yang memprioritaskan hak atas tanah dan keadilan sosial, dan perusahaan yang memprioritaskan keuntungan dan akses terhadap sumber daya alam. Pemerintah, sebagai mediator, memiliki peran penting untuk menyelesaikan konflik agraria dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi.

Konflik kepentingan di Indonesia terkait kelas buruh, tuntutan keadilan sosial, dan distribusi kekayaan merupakan isu yang kompleks dan multi-dimensi. Perbedaan kepentingan antara kelas buruh, pemilik modal, dan elite politik menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik ini. Penting untuk membangun dialog dan negosiasi yang konstruktif untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelas buruh dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinamika perubahan politik di Indonesia selama era modernisasi dan industrialisasi merupakan proses yang kompleks dan multi-dimensi. Meskipun modernisasi dan industrialisasi telah membawa kemajuan ekonomi dan peningkatan partisipasi politik, namun juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori pembangunan politik dan konteks spesifik Indonesia sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis lebih detail aspek-aspek spesifik dari dinamika ini, misalnya dengan studi kasus yang lebih terfokus.

## **Kesimpulan**

Konflik kepentingan di Indonesia terkait kelas buruh, tuntutan terhadap keadilan sosial, dan distribusi kekayaan merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan. Seiring dengan dinamika ekonomi dan industrialisasi, kelas buruh menghadapi tantangan serius, termasuk upah yang tidak layak, kondisi kerja yang buruk, dan akses terbatas terhadap perlindungan sosial. Tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan sosial sering kali berbenturan dengan kepentingan pemilik modal dan elite politik. Melalui analisis beberapa contoh kasus, seperti konflik upah minimum, penggunaan tenaga kerja kontrak, konflik pertambangan, dan konflik agraria, dapat dilihat bahwa perbedaan kepentingan ini menghasilkan ketegangan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang serius. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelas buruh dan mendorong keadilan sosial yang lebih inklusif.

Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas buruh, masih banyak kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan atau diimplementasikan secara efektif. Ada kecenderungan bahwa kebijakan yang ada sering kali dibuat tanpa melibatkan suara dan perspektif dari kelas buruh dan serikat pekerja. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan

keputusan sering kali mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam konteks ini, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan dialog antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja, agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil dan responsif.

Peningkatan dialog sosial harus membuka ruang bagi dialog antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang lebih adil. Keterlibatan aktif kelas buruh dalam pengambilan keputusan akan membantu memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan. Penegakan hukum yang ketat yang harus dilakukan pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dalam melindungi hak-hak pekerja dan mencegah pelanggaran. Mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan harus disediakan untuk menangani pelanggaran hukum dan ketidakadilan.

Peningkatan pendidikan dan literasi di kalangan pekerja sangat penting untuk memberdayakan mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Program pelatihan tentang hak-hak pekerja dan cara berorganisasi akan membantu kelas buruh untuk lebih memahami posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi. Kemudian, kebijakan yang terkait upah minimum dan perlindungan sosial sebaiknya berbasis pada data dan analisis yang komprehensif tentang kondisi kehidupan buruh. Penelitian yang mendalam dan partisipatif dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan nyata kelas buruh dan merumuskan solusi yang tepat.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Abdi, M Ikhwan Maulana Haeruddin, Fahrina Mustafa, Riad Mustafa, Nurul Fadilah Aswar, Annisa Paramaswary Aslam, Muh Yushar Mustafa, and Widhi Nurgraha SD. "Pelatihan Dan Pengembangan SDM Dalam Perspektif Ilmu Manajemen: Sebuah Studi Literatur." *Southeast Asia Journal of Business, Accounting, and Entrepreneurship* 1, no. 1 (2023): 1–7.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Bumi Aksara, 2022.
- Daud, Sulhi Muhmad. "Penafsiran Hukum Dalam Proses Perubahan Sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 74–82.
- Dwiastuti, Rini. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi Kuantitatif-Kualitatif*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Hadiz, Vedi. *Lokalisasi Kekuasaan Di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Liana, Wendy, Sri Yani Kusumastuti, Darwin Damanik, Dalizanolu Hulu, Apriyanto Apriyanto, Loso Judijanto, Tono Wartono, Suharto Suharto, Fitriyana Fitriyana, and Hariyono Hariyono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rochadi, A F Sigit. *Perilaku Kolektif Dan Gerakan Sosial*. Rasibook, 2020.
- Salim, Agus. *Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi*. Nuansa Cendekia, 2023.